



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 306/MENKES/SK/VIII/2012

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI PREVALENSI TUBERKULOSIS NASIONAL
DI INDONESIA TAHUN 2012-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa program pengendalian tuberkulosis (TB) nasional di Indonesia perlu dilakukan guna mengonsolidasikan kemajuan dan mengatasi serangkaian tantangan baru melalui strategi nasional dalam mewujudkan pencapaian target MDG's ;
- b. bahwa untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai beban penyakit TB dan mengidentifikasi cara meningkatkan program TB, perlu dilakukan survei prevalensi TB Nasional di Indonesia ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pelaksana Survei Prevalensi Tuberkulosis Nasional Di Indonesia Tahun 2012-2013
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/II/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/MENKES/PER/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New Emerging* dan *Re-Emerging*;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI PREVALENSI TUBERKULOSIS NASIONAL DI INDONESIA TAHUN 2012-2013 ;

KESATU : Tim Pelaksana Survei Prevalensi Tuberkulosis Nasional Di Indonesia Tahun 2012-2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pakar/ahli yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- KELIMA : Tim wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Menteri Kesehatan setelah Survei Prevalensi Tuberkulosis Nasional di Indonesia Tahun 2012-2013 selesai dilaksanakan.
- KEENAM : Seluruh pembiayaan terkait pelaksanaan kegiatan Survei Prevalensi Tuberkulosis Nasional di Indonesia Tahun 2012-2013, dibebankan pada ATM GF TB melalui anggaran DIPA Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2012

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 306/MENKES/SK/VIII/2012
TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI
PREVALENSI TUBERKULOSIS
NASIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2012-2013

SUSUNAN TIM PELAKSANA SURVEI PREVALENSI TUBERKULOSIS
NASIONAL DI INDONESIA TAHUN 2012-2013

- Pelindung : Menteri Kesehatan
- Tim Pengarah : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3. Sekretaris Jenderal
4. Kepala Badan Pusat Statistik
- Narasumber : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
2. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
3. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
4. Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik
5. Kepala Bidang Upaya Kesehatan Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
6. Kepala Sub Direktorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
7. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Tuberkulosis Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung
8. Koordinator Laboratorium Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
9. WHO – HQ (*Impact Measurement*)

Tim Teknis ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- Tim Teknis : 1. Prof. dr. Sudijanto Kamso (KOMLI TB)
2. Prof. Dr. dr. Agus Syaruhrahman (Pokja Laboratorium TB)
3. Prof. Dr Faisal Yunus, SpP (K) (PDPI)
4. Soeharsono Soemantri, Ph.D (Litbangkes)
5. dr. Iwan Ariawan, MPH (UI)
6. dr. Bacht Alisyahbana, Sp.PD, Ph.D (TORG)
7. dr. Aziza G. Icksan, Sp. Rad (K) (RS. Persahabatan)
8. dr. Pandu Riono, MPH, Dr. PH (TORG)
- Tim BPS : 1. Ir. Dudi S. Sulaiman, M.Eng
2. Drs. Wynadin Imawan, M.Sc
3. Dr. Dedi Walujadi, MA
4. Dr. Hamonangan Ritonga, M.Sc
5. Ir. Purwanto Ruslam
6. Gantjang Amanullah, MA
7. Mohammad Noor Farid, S.Si., PhD
- Penanggung jawab Penelitian : Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
- Ketua Pelaksana : dr. Dina Bisara Lolong, MA
- Wakil Ketua : 1. Dr.dr. Francisca Sriotami Tanoerhardjo, Sp PK, M.Si
2. dr. Lamria Pangaribuan
3. dr. Ainur Rofiq
- Koordinator Wilayah :
1. Tim I : Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi
Ketua : Dr. dr. Laurentia Konadi, MS, Sp.OK
Wakil : Dra. Mardiana, MS
2. Tim II : Provinsi Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau
Ketua : dr. Natalie Laurencia
Wakil : Kristina Tobing, SKM, M.Epid
3. Tim III : Provinsi DKI, Jawa Barat
Ketua : dr. Yuana Wiryawan, M.Kes
Wakil : Iram Barida, SKM, MKM
4. Tim IV ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

4. Tim IV : Provinsi Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta
Ketua : dr. Teti Tejayanti, MKM
Wakil : Ning Sulistiyowati, SKM, M.Kes
5. Tim V : Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
Barat
Ketua : Feri Ahmadi, MPH
Wakil : dr. Felly Senewe, M.Kes
6. Tim VI : Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Maluku, Maluku Utara
Ketua : dr. Lusianawaty Tana, MS, Sp.OK
Wakil : Dra. Siti Isfandari, MA
7. Tim VII : Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara. Gorontalo, Sulawesi Barat,
Papua Barat, Papua
Ketua : Merryani Girsang, M.Sc
Wakil : Dr. Riris Nainggolan
- Koordinator Laboratorium : dr.Irfan Ediyanto
Koordinator Radiologi : Annila Suryo Saputro
- Manajemen Data :
Koordinator : Joko Irianto, SKM, M.Kes
Wakil Koordinator : Oster Suriani, SKM, MKM
Anggota : 1. Miko Hananto, SKM, M.Kes
2. Narendro Arifia, S.Kom
3. Agung Sudilaksono, SE
- Administrasi dan Keuangan :
Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Pusat
Teknologi Intervensi Kesehatan
Masyarakat
Wakil Koordinator : Kepala Subbidang Upaya Kesehatan
Masyarakat, Pusat Teknologi Interervensi
Kesehatan Masyarakat
- Bendahara : Dwi Ariani
Wakil bendahara : Heru Nugroho, S.IP

Anggota Administrasi ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

Anggota Administrasi

- : 1. Siti Mulyani, SKM
2. Serlianti Arunglabi
3. Marthin Marietta, SE
4. Arhenius Pangaribuan
5. Farida Kusumaningrum, SKM
6. Muniroh, SE
7. Setyo Utomo Nugroho, SAnt



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 306/MENKES/SK/VIII/2012
TENTANG TIM PELAKSANA SURVEI
PREVALENSI TUBERKULOSIS
NASIONAL DI INDONESIA
TAHUN 2012-2013

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA SURVEI PREVALENSI
TUBERKULOSIS NASIONAL DI INDONESIA TAHUN 2012-2013

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung jawab
1	Tim Pengarah	Memberi arahan terhadap kegiatan survei
2	Narasumber	Memberi masukan dari persiapan sampai pembuatan laporan sesuai bidang dan keahliannya
3	Tim Teknis	Memberi masukan substansi survei
4	Penanggung jawab Penelitian	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan survei
5	Tim BPS	Bertanggung jawab terhadap penyusunan pembuatan <i>sampling frame</i> , seleksi desa dan cluster, sosialisasi (<i>video conference</i>), <i>updating and collecting household information</i> , <i>desain sampling weight</i> dan estimasi <i>sampling error</i> dalam survei
6	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis survei dan pemantauan administrasi, serta pembuatan laporan gabungan survei TB Prevalensi
7	Wakil Ketua Pelaksana 1	a. Bertanggung jawab terhadap pembuatan SOP <i>chest x-ray</i> b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survei prevalensi TB di KTI c. Bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan di KTI d. Bertanggung jawab terhadap pemantauan administrasi di KTI
8	Wakil Pelaksana 2	a. Bertanggung jawab terhadap pembuatan kuesioner survei prevalensi TB b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survei prevalensi TB di Jawa - Bali



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

		<p>c. Bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan di Jawa - Bali</p> <p>d. Bertanggung jawab terhadap pemantauan administrasi di Jawa - Bali</p>
9	Wakil Ketua Pelaksana 3	<p>a. Bertanggung jawab terhadap pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) laboratorium dan pengorganisasian lapangan</p> <p>b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan survei prevalensi TB di Sumatera</p> <p>c. Bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan di Sumatera</p> <p>d. Bertanggung jawab terhadap pemantauan administrasi di Sumatera</p>
10	Ketua Koordinator Wilayah	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengumpulan data di masing-masing tim survei pengumpulan data dan membantu mulai persiapan sampai pembuatan laporan.
11	Wakil Koordinator Wilayah	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengumpulan data di masing-masing tim survei pengumpulan data dan membantu mulai persiapan sampai pembuatan laporan.
12	Koordinator Laboratorium	Bertanggung jawab terhadap proses pemeriksaan laboratorium selama pelaksanaan survei
13	Koordinator Radiologi	Bertanggung jawab terhadap proses pemeriksaan radiologi selama pelaksanaan survei
14	Koordinator Manajemen Data	Bertanggung jawab terhadap pembuatan SOP, persiapan, proses manajemen data dan analisis.
15	Wakil Koordinator Manajemen Data	Bertanggung jawab terhadap pembuatan SOP, persiapan, proses manajemen data dan analisis.
16	Koordinator Administrasi dan Keuangan	Bertanggung jawab terhadap proses administrasi dan keuangan pelaksanaan survei
17	Wakil Koordinator Administrasi dan Keuangan	Bertanggung jawab terhadap proses administrasi dan keuangan pelaksanaan survei



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

18	Bendahara	Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan laporan keuangan survei.
19	Wakil Bendahara	Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan laporan keuangan survei.
20	Anggota Administrasi	Bertanggung jawab terhadap proses surat menyurat dan kelengkapan pertanggung jawaban keuangan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NAFSIAH MBOI